

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UPAH BURUH
SETELAH KERING KOPI**

**(Studi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

SAIFUL ANWAR

NPM 1621030507

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M. Ag.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam upah mengupah harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Sistem upah mengupah yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya akan mengakibatkan tidak sahnya akad upah mengupah. Dalam praktiknya antara pemilik kebun dengan pekerja buruh kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, terjadi kerja sama dalam hal pemanenan kopi dengan sistem pembayaran upah yang ditangguhkan hingga kering kopi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan hukum Islam karena ada salah satu rukun dan syarat upah yang tidak terpenuhi, yaitu *ujrah* (upah) pekerja. Pembayaran upah tersebut tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayaran diakhir masa kering kopi, sedangkan untuk mengeringkan kopi butuh waktu paling lama dua minggu dengan cuaca yang panas, sedangkan jika musim hujan biasanya menghambat keringnya kopi dan juga upahnya kurang sesuai. Selain karena upah yang ditangguhkan, upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena harus menunggu kering kopi terlebih dahulu. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan. Karena adanya rukun dan syarat upah yang belum terpenuhi, yaitu pembayaran buruh yang ditangguhkan sampai biji kopi kering yang tidak jelas kapan waktunya. Sehingga pembayaran upah tersebut mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam waktu pembayaran upah buruh pemetik biji kopi, selain itu praktik tersebut mengandung kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Anwar

Npm : 1621030507

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis,

Saiful Anwar
NPM. 1621030507



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN UPAH BURUH SETELAH
KERING KOPI (Studi di Desa Ciptawaras
Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat)**

**Nama : Saiful Anwar
NPM : 1621030507
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP.195607271988031001

NIP.197807252009121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UPAH BURUH SETELAH KERING KOPI** (Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat)" disusun oleh **Saiful Anwar Npm. 1621030507** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 23 Oktober 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, MH.

Penguji Utama : Drs. H. Haryanto H., M.H

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Drs. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah Saw : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah)¹

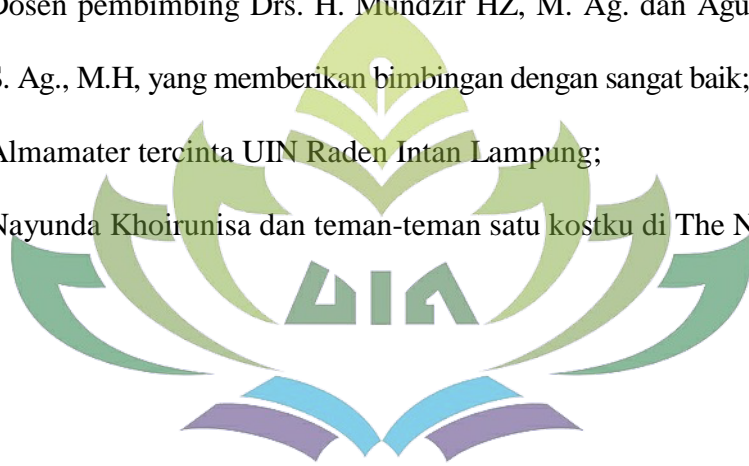


¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2* (Beirut: Daral Fikri, 1415 H), h. 20.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ibuku tercinta Suwaibah dan ayahku Suarna yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materil, dan senantiasa membimbingku dengan sangat baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Dosen pembimbing Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag. dan Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H, yang memberikan bimbingan dengan sangat baik;
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
4. Nayunda Khoirunisa dan teman-teman satu kostku di The Nyam Homstay.



RIWAYAT HIDUP

Saiful Anwar lahir di Desa Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 01 November 1997. Anak pertama yang terlahir dari pasangan Bapak Suarna dan Ibu Suwaibah.

Riwayat pendidikannya di Sekolah Dasar di SDN 1 Trimulyo pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Gedung Surian selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan Sekolah Kejuruan di SMK Darul Hikam selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.



Bandar Lampung,

Penulis,

Saiful Anwar
NPM. 1621030507

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur *alhamdulillah rabbil'alamin* penulis panjarka atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi”**(Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H, beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

3. Ketua jurusan muamalah Bapak Khairuddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. selaku sekretaris jurusan muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing Akademik Bapak Drs. Mundzir HZ.M.Ag dan Ibu Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua nara sumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2016.



Bandar Lampung,
Penulis,

Saiful Anwar
NPM. 1621030507

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukun Akad	17
4. Syarat Akad.....	19
5. Jenis-Jenis Akad.....	22
6. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam	23
7. Berakhirnya Akad	25
B. Upah	27
1. Pengertian Upah	27
2. Dasar Hukum Upah.....	31
3. Rukun dan Syarat Upah	37
4. Macam-Macam Upah.....	43
5. Sistem Pembayaran Upah	44
6. Berakhirnya Upah	45
C. Tinjauan Pustaka	45

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat	49
1. Sejarah Desa Ciptawaras	49
2. Kondisi Geografis dan Demografis	49
3. Struktur Organisasi Desa Ciptawaras	56
4. Kondisi Sosial Ekonomi, Ekonomi dan Budaya.....	57
B. Praktik Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi di Desa Ciptawaras.....	61

BAB IV : ANALISA DATA

A. Praktik Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat ...	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Dusun dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	52
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	54
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	57
5. Jumlah Tempat Ibadah	58
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan untuk pembuatan proposal ini. Maka perlu adanya suatu penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berhubungan dengan tujuan skripsi ini. Dengan penjelasan ini diharapkan tidak ada kesalahan pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan suatu proses penekanan pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi” (Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat). Untuk itu perlu diartikan pengertian dari istilah-istilah judul di atas sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah,menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam yaitu hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun Al-sunnah untuk mengatur

¹Dapartemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi empat*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama,2008), h.1470.

kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan ruang manusia.²

3. Upah yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³
4. Buruh yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah dari hasil kerjanya.⁴
5. Kering Kopi yaitu kopi yang telah di panen dan dikeringkan dibawah sinar matahari.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi”(Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat) adalah untuk mengetahui cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Alasan objektif
 - a. Mengingat sangat banyak kebutuhan manusia sekarang ini yang berkembang pesat maka banyak pula persoalan yang terjadi didalam muamalah sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada

² Said Agil Husin Al-munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 06.

³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2014), h. 149.

⁴Dapartemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi empat....*, h. 227.

⁵*Ibid.*, h. 732.

zaman sekarang ini, lebih spesifiknya ingin mengetahui cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi.

2. Alasan subjektif

- a. Disamping itu ada juga relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Bidang *Muamalah* Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Topik yang dibahas merupakan hal yang terjadi pada masyarakat Desa Ciptawaras yaitu di wilayah Kec. Gedung Surian, Lampung Barat.

C. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya masalah antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.

Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.⁶

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama *fiqh* adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Quran, As-Sunah, *ijma'* maupun *qiyas* yang sah. Menurutnya benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.⁷

Upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).⁸ Upah dan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting di

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta, Uii, 2004), h.11.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.113.

dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat persentase para buruh yang bekerja pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, menurut syara' *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan dengan membayarkan upahnya.⁹ Begitu juga dengan buruh di Lampung Barat. Secara umum penduduk di Lampung Barat menggantungkan hidupnya sebagai tenaga kerja atau buruh.

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.¹⁰

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Quran surat (Al-Thalaq:6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”(QS. At-Talaq : 6)

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis adalah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ
 بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه
 ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad

Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin

Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami

⁹Ulin Nuha, *Buku Saku Fiqih Mazhab Syafe'I* (Yogyakarta: Al Barokah, 2014), h. 43.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...., h. 149.

[‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:" berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Maja)¹¹

Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berjarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termaksud salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.¹²

Berkaitan dengan hal ini di Desa Ciptawaras, Kec. Gedung Surian adalah sebuah Desa yang sebagai besar wilayahnya merupakan lahan perkebunan yang berupa perkebunan kopi. Sistem pengupahannya setelah kering kopi sedangkan untuk mengeringkan kopi butuh waktu paling lama 2 minggu dengan cuaca yang panas, sedangkan jika musim hujan biasanya menghambat keringnya kopi.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh di wilayah Desa Ciptawaras pengupahan buruh dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni pengupahan pengambilan kopi menunggu waktu selesai 1

¹¹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123.

¹²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 30.

bidang kebun baru dikilang. Penanguhan pembayaran upah buruh seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), pemilik kebun hanya cukup meminta bantuan kepada buruh kopi, kemudian para buruh mulai bekerja mulai bekerja dari pagi sampai sore. Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai, para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik kebun seperti pengambilan biji kopi yang sudah tua, upah buruh di berikan setelah kering kopi.

Para buruh kopi disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil dari panen kopi, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore di potong masa istirahat *Dzuhur*, setengah hari dihitung dari mulai pukul 7 pagi hingga waktu *Dzuhur* tiba.

Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Nergara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹³

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya diakhir masa kering kopi. Di lain pihak buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik kebun.

Namun permasalahan yang sering terjadi ketika saat pembayaran buruh kopi biasanya harus menunggu kering kopi sedangkan untuk mengeringkan kopi butuh waktu paling lama 2 minggu dengan cuaca yang panas, sedangkan jika musim hujan biasanya menghambat keringnya kopi dan juga upahnya kurang sesuai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulisan untuk lebih tahu mendalam tentang pembayaran upah buruh kopi setelah kering kopi. Penyusun menuangkan dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum

¹³ Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 29, No. 1 (Februari 2017). h. 83

Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi”(Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat).

D. Fokus Masalah/Batasan Masalah

Batasan masalah dalam skripsi ini berfokus kepada sistem pembayaran upah buruh setelah kering kopi, apakah sudah sesuai dengan syarat Islam yang benar atau belum.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas bisa diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah buruh setelah kering Kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini sangat berguna untuk masyarakat, karena wawasan dan ilmu mengenai tentang sistem pengupahan (*ijarah*) terus berkembang di masyarakat, juga diharapkan mampu untuk memberikan suatu pemahan mengenai sistem pembayaran upah (*ijarah*) yang sesuai dengan syariat hukum Islam.
- b. Secara peraktis, penelitian ini bermaksud untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syar'iah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik upah buruh kopi dalam pandangan hukum islam. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan apakah praktik upah buruh kopi menciptakan kemasalahan bagi pemilik kebun dan buruh.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu. Cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field reseach* yaitu suatu penelitian yang mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya¹⁴, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk penelitian.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakuka dengan tujuan untuk mendeskripsikan satu atau lebih variabel tanpa perlu membandingkan atau mencari hubungan antarvariabel dan untuk menggambarkan mengenai pemberian upah buruh setelah kering Kopi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang fakta atau populasi tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat.¹⁵

2. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).¹⁶ Data primer ini di dapat dari buruh di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat. Data primer pada penelitian ini adalah pemilik kebun kopi dan buruh pekerja pemetik kopi.

b. Data sekunder

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach* (Bandung: Social Mandar Maju, 1996), h. 33.

¹⁵Sedarmayanti, dkk, *Metodologi Penelitian* (Bandung:Mandar Maju, 2002) , h. 16.

¹⁶*Ibid.* h. 73.

Data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintahan maupun swasta, misalnya: badan pusat statistik, survei riset Indonesia, dan lain-lain).¹⁷

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Mengingat populasi yang ada dilapangan hanya berjumlah 30 orang maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sehubungan dengan populasi yang ada, terdapat beberapa orang yang sudah berpindah tempat dan ada yang telah meninggal dunia, sehingga tidak dimungkinkan semua populasi menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi 5 orang pemilik kebun, dan 15 orang buruh.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian kualitatif dengan metode obsevasi menggiring pengamat ke dalam kompleksitas fenomenologidari dunianya, dimana hubungan (koneksi), kerelasi dan penyebabnya dapat dikenali, dan tidak dibatasi oleh adanya kategori

¹⁷*Ibid.* h. 73.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian , Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

pengukuran atau kategori yang muncul dan memuat makna tentang subyek.¹⁹

b. Wawancara

Merupakan tehnik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan masalah variable, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.²¹ Dokumentasi pada penelitian ini berupa data-data tentang desa, berupa data kependudukan desa.

5. Metode pengolahan data

a. *Editing*

Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban, jawaban responden sudah lengkap apa belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, ke semuanya.²²

b. *Sistemazing*

¹⁹*Ibid.* h. 74.

²⁰*Ibid.* h. 137.

²¹*Ibid.* h. 85.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grapik, 2008), h.

Sistemazing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah.²³

6. Metode analisis data

Analisis yang di gunakan adalah penelitian kualitatif karna teknis analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.²⁴



²³*Ibid.* h. 107.

²⁴*Ibid.* h.243

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai mana salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakan isinya.²⁵ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.²⁶

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, talak, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.²⁷ Sedangkan menurut para ulama *fiqh*, kata akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²⁸

Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2012), h. 71.

²⁶Ascarya, *Akad dan Peroduk Bank Syaruah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 35.

²⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Sariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 46.

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h. 71.

pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diadakan.²⁹

2. Dasar Hukum Akad

Ibnu Tarimiyah dalam *al-fatwa al-kubra'* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastaniah berpendapat bahwa sesungguhnya “akad” itu harus ditepati karena *syara'* sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.³⁰

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi “akad” adalah sebagai berikut³¹:

a. Surat Al-Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
(QS. Al-Maidah [5] : 1)³²

b. Surat Al-Imran [3] : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

²⁹*Ibid.*, h. 73.

³⁰Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Rosda, 2016), h. 7.

³¹*Ibid.*, h. 7-10.

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Semarang: Kumudasmor Grafindo, 1994), h. 156.

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Imran [3] :76)³³

c. Surat Al-Anfal [8] : 58

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal [8] : 58)³⁴

3. Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi rukun akad yang merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut antara lain yaitu:

a. Subjek akad (*aqad*)

Orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.³⁵

b. Pelaku akad (*Shighat al-aqad*)

Ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelsan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya

³³*Ibid.*, h. 88.

³⁴*Ibid.*, h. 261.

³⁵Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 47.

ijab.³⁶ Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli suatu sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

1) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu biasa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi:

- a) *Ahliyah wujub* yaitu pelaku akad berkompoten untuk menunaikana kewajiban dan mendapatkan hak.
- b) *Ahliyah 'ada* yaitu pelaku akad berkompoten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

2) Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.³⁷

- a) objek akad (*Al-ma'qud'alaih*), ialah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.³⁸

Adapun syarat objek akad, yaitu:

- (1) harus legal
- (2) Bisa diserahterimakan pada waktu akad

³⁶*Ibid.* h. 48.

³⁷Oni sahrani, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Syariahi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 34.

³⁸Hisaruddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Grenta Press, 2008), h. 8.

(3) Diketahui oleh seluruh pihak akad

(4) Terjadi ketika akad

b) Tujuan pokok akad

Maudhu' al- 'aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan *Maudhu' al- 'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan (*al-maqshad al-ashli alladzi syuri, a al- 'aqd min ajlih*).³⁹ Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.⁴⁰ Namun akad tersebut baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut⁴¹

4. Syarat Akad

a. *Aqid* (subjek akad)

Disyaratkan bagi subjek hukum adalah *balig* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula orang yang cakap hukumlah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya implikasi hukum.

³⁹Oni sahrani, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*...., h. 40.

⁴⁰*Ibid.*, h.72.

⁴¹ *Ibid.*, h. 74.

b. *Ma'qud'alaih* (objek akad) disyaratkan:

- 1) Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada (*bai'ma'dum*) seperti jual beli ijon. Namun menurut pendapat Ibnu Qayyim dan sebagian pengikut Imam Hanbali bahwa objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan *gharar*. Ibnu Qayyim juga berkata bahwa *illat* pelarangan *bai'ma'dum* bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gharar*. *Gharar* yang dimaksud disini adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik barang itu ada pada waktu akad ataupun tidak.
- 2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari'at, maka tidak seperti jual beli *khamar*/miras dan narkoba.
- 3) Dapat diserahkan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung di udara.
- 4) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Hal ini berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadis nabi

yang melarang *bai' gharar* dan *bai' majhul* (jual beli dengan komoditi yang tidak diketahui).

- 5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun imateri, artinya jelas kegunaan yang terkadang dari apa yang diakadkn tersebut.

c. *Sighat Akad*

Merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau lebih yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. *Sighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang menawarkan atau mengawali akad. Maka penawaran dalam jual beli dinamakan *ijab*, baik berasal dari penjual maupun pembeli. Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya jual” dinamakan *ijab*, atau pembeli yang mengawali dengan perkataan “saya beli” juga dinamakan dengan *ijab*. Sedangkan *qabul* adalah respons yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. *Qabul* ada kalanya berasal dari penjual dan ada kalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung sebagaimana dalam *ijab*, misalnya dengan kalimat saya terima, setuju, atau *deal*. *Ijab* dan *qabul* disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jelas menunjukan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
- 2) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual maka jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka akad tidak sah. Bersambungnya antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada suatu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya *ijab*.
- 3) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.⁴²

5. Jenis-Jenis Akad

Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

a. Akad yang legal (sah)

- 1) Bentuk dasar akad yang legal, yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).

⁴²*Ibid.*, h. 38-43.

- 2) Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara'.

b. Akad yang tidak legal

- 1) Bentuk dasar akad yang tidak legal, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/ *shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad.
- 2) Sifat akad yang tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang dilarang syara' seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan, bahwa legalitas suatu akad itu adakalanya terkait pada rukun dan syarat akad, dan adakalanya terikat pada sifat-sifat yang harus dipenuhi.⁴³

6. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

a. Asas Ibadah (*mabda' al-ibadah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada alil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah.

⁴³Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*..., h. 95-96.

b. Asas Kebebasan Berakad (*mabda' hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan terciptanya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam alquran dan hadist terapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib"

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-mu'awadhah*)

Meskipun secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan

antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

f. Asas Kemasalahan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemasalahan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemasalahan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

g. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitas ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alquran yang menegaskan, “berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”⁴⁴

7. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan sebab *fasakh* (pemutusan) atau kematian. Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir:

⁴⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 83-92.

a. Berakhirnya akad dengan sebab fasakh. Akad fasakh karena beberapa kondisi:

- 1) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh* (rusak). Apabila terjadinya akad *fasid* seperti jual beli *majhul* (objek jual beli tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di-*fasakh*-kan oleh kedua belah pihak atau hakim, kecuali bila terapat penghalang untuk men-*fasakh*-kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
- 2) Fasakh dengan sebab *khiyar* (pilihan). Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh men-*fasakh*-kan akad. Tetapi pada *khiyar aibi* (aib) kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh men-*fasakh*-kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
- 3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal di kemudian hari maka dia boleh menarik kembali akad yang telah terlaksana berdasarkan kerelaan pihak lain.
- 4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerah barang/harga). Misalnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi fasakh.
- 5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad fasakh dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya

tujuan akad. Seperti ijarah berakhir dengan habisnya waktu ijarah.

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah ijarah. Menurut Hanafiyah ijarah berakhir dengan sebab meninggalnya salah satu orang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut para ulama selain Hanafiyah akad ijarah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.⁴⁵

B. Upah

1. Pengertian Upah

Upah menurut istilah terminologi, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴⁶

⁴⁵Darsono, Ali sakti, Siti Astiyah, Androecia Darwis, Enny Tin Suryanti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.54-55.

⁴⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 149.

Upah atau Ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional ijarah itu sendiri. *Idris Ahmad* dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan *Kamaluddin A. Marzuki* sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya sayyid *Sabiq* menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa.⁴⁷ Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah, *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁴⁸

Menurut pengertian lain mengatakan Ijarah adalah perjanjian Sewa-Menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu *Lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, Ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease Contract* adalah suatu lembaga

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*, h.113.

⁴⁸*Ibid.*, h.114 .

keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁴⁹

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undang dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.⁵⁰

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat.

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cet.1, h.245.

⁵⁰Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4.

Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.⁵¹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁵² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ijarah ialah "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".
- b. Menurut Ulama Malikiyah ijarah ialah: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".⁵³
- c. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".⁵⁴

⁵¹M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h.180.

⁵²Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*, h. 114.

- d. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.⁵⁵

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.⁵⁶

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

a. Al-qur'an

Al-Qur'an menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukan pada wajan *fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.⁵⁷ Dalam hukum Islam pengambilan hukum yang pertama adalah Al-Quran.

Ijarah atau upah dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat

⁵⁴*Ibid.*, h.115.

⁵⁵Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), H.98

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h.115.

⁵⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 49.

digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ujroh*.

Disamping itu *ujroh* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujroh* yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.⁵⁸

Dasar- dasar hukum atau rujukan *ijarah/upah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

1) Al-Qur'an surat Al-Thalq ayat 6:



Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Al-Thalaq : 6)⁵⁹

Dalam surat At-Thalaq ayat 6: Allah memerintahkan kepadahamba-hambanya yang beriman agar membayar upah menyusui kepada ibunya yang telah diceraikan.

⁵⁸M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah", (Jurnal Al Adalah: Vol.XIV, No.2, 2017), h. 487. No 2 (2017), h. 487.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., h. 946.

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 233)⁶⁰

Ayat diatas menegaskan bahwasannya penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah

⁶⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya...., h. 56.

membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, dan lain-lainatas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁶¹

3) Al-Qur'an surat An-Nahl [16] ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl : 97)⁶²

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 561

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., h. 417.

imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁶³

b. Hadis

Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
 وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ
 أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: allah ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku

⁶³M. qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009), h. 610.

lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerjaan kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”⁶⁴

Selain ayat dan hadis diatas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*⁶⁵, baik dalam bentuk dalam sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan. Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁶⁶

c. *Ijma'*

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia.⁶⁷

Ibnu rusdy dalam kitab bidayah al-mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fugaha* negri besar dan *fugaha* masa pertama”. *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

⁶⁴Isnaini Harapah, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 8.

⁶⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 105.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 7.

⁶⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama (Jakarta: 2010), h. 145-146.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qobul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.⁶⁹

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakal)

Mu'jir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁷⁰ Allah swt. berfirman:

⁶⁸Muhamad Syafe'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁶⁹Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah Kontempore....*, h. 125.

⁷⁰Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁷¹

Disyaratkan kepada seseorang yang telah melakukan akad untuk mengambil manfaat suatu barang untuk dijadikan sebuah akad agar mencegah terjadinya perselisihan. Dan disyariatkan untuk kedua belah pihak dan dapat membedakan. Tidaklah sah suatu akad tersebut apabila yang berakad itu gila atau anak kecil belum baligh dan belum dapat membedakan.⁷²

2) *Sighat*

Yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qobul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qobul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qobul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *sighat* atau *ijab qobul*.

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., h. 122.

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205.

Jika sudah terjadi *ijab qobul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah terjadidan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.⁷³

3) Upah

Yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun syarat-syarat dalam dalam pembayaran upah (*ujroh*) adalah sebagai berikut:

- a) Tidak berkurang nilainya.
- b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- c) Adanya manfaat yang jelas.
- d) *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang telah dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal.⁷⁴

4) Manfaatnya

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus mengetahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenagany. Oleh sebab itu jenis pekerjaan yang harus dijelaskan, seHINGA tidak pergi,

⁷³Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah....*, h. 27-28.

⁷⁴Rachmad Syafei, *Fiqh muamalah....*, h. 129.

karena transaksi upah yang masih pergi hukumnya adalah *fasid*.⁷⁵ Karena itu semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷⁶

- (a) Dalam sewa-menyewa harus diketahui secara jelas manfaat dari akad tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik memberikan informasi yang transparan tentang kualitas dan manfaat barang tersebut.
- (b) Objek *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan diserahkan terimakan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* nya apabila harta benda masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- (c) Objek *ijarah* berikut manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hikum *syara'*. Misalkan transaksi sewa-menyewa VCD pornografi maupun sewa-menyewa rumah untuk kegiatan maksiat maka tidaklah sah transaksi tersebut.
- (d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Maksudnya tidak dibenarkan sewa-menyewa atas manfaat suatu benda yang sifatnya tidaklah langsung.

⁷⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), h. 231.

⁷⁶Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183-185.

Sewa-menyewa yang mengandung ketidak jelasan seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya.

- (e) Objek *ijarah* yang dijadikan harta benda haruslah harta yang bersifat *istihlahki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makan tidak sah *ijarahnya* atasnya.

b. Syarat upah (*Ijarah*)

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada *ijarah* sebagai berikut:⁷⁷

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inaqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid* yakni orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad.⁷⁸ Namun, tidak di syaratkan baligh. ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal.

⁷⁷Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 197.

⁷⁸Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 34-35.

2) Keridhaan pihak yang berakad (*An-taradin*)

Artinya kedua belah pihak yang berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan untuk melakukan upah mengupah atau sewa menyewa dengan paksaan dari salah satu pihak ataupun dari pihak lain.⁷⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

3) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah*

Harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan beberapa lama manfaat ditangan penyewa.

4) Penjelasan tempat manfaat

Manfaat tempat atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewakan seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain.

⁷⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80.

Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.⁸⁰

4. Macam-Macam Upah

Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaatnya atas pekerja (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, took, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa (Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 1997).

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas

⁸⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 108.

karyanya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merk dagang, logo dan sebagainya.⁸¹

5. Sistem Pengupahan dan Pembayaran upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu di berikan. Jika *Ijarah* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada masa berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, sedangkan akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan dengan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafe'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat barang yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁸²

Hak-hak menerima upah bagi seorang *musta'jir* yaitu:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka berikanlah upah sebelum keringatnya kering.
- b. Jika menyewakan barang, maka uang sewaan yang dibayarkan ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁸¹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h. 124-125.

⁸²Abdul Rahman Ghazali, Dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 280.

6. Berakhirnya Upah

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau celana yang dijahitkan hilang.
- b. Pembatalan akad
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- d. Menurut jumhur ulama unsur-unsur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.

C. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Faria Umami Kulsum (2018) tentang tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah buruh pada CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Prosedur pengupahan pekerja di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ini menggunakan sistem upah satuan waktu dimana para karyawan diberikan upahnya perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Terkadang jika ada pekerja tambahan pekerja mendapat upah lembur. Dan untuk penentuan upah serta hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dengan para pekerja sudah disepakati di awal perjanjian kerja walaupun terkadang pada prakteknya berbeda

seperti dalam pemberian upah tidak tepat waktu atau mundur, dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya penjualan batu split sepi, piutang yang belum terbayar sedangkan barang harus selalu siap sedia akibatnya antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang hasilnya pengupahan terhadap para pekerja terpaksa sering ditunda, dari pelaksanaan praktik penundaan pembayaran upah buruh yang terjadi pada semua pekerja yang bekerja di CV. Bangkit Jaya dapat digaris bawahi bahwa terdapat pekerja yang merasa dirugikan dan ada pekerja yang merasa biasa-biasa saja menanggapi adanya pemberian pengupahan yang sering tidak tepat waktu sesuai perjanjian kerja diawal bekerjanya.

2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Wahyu Nely Gayastri (2018) Praktik pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dilaksanakan sebagai berikut: pertama, dengan menggunakan sistem *moro anak* yaitu pengupahan yang diberikan berupa anak sapi (*pedet*) yang biasanya anak sapi yang pertama yang digunakan sebagai bentuk upah. Kedua menggunakan sistem *maro bathi* yaitu pengupahan yang diberikan berupa keuntungan dari hasil penjualan sapi. Namun dalam pelaksanaan yang terjadi di Kecamatan Plantungan ini *Ajr* (buruh) tidak dibayar dengan apa yang telah disepakati di awal akad. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai *Ijarah nafs* pada pengupahan atas jasa pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik

pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Plantungan banyak yang menggunakan kata akad pengupahan atau menggunakan akad *Ijarah*, melainkan dalam pelaksanaannya masyarakat Plantungan lebih menggunakan sistem *musharabah*.

3. Berdasarkan hasil penelitian oleh Herul Anam (2017) tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Dalam Perjanjian Kerja Panen Biji Kopi Diantara Pemilik Kebun Kopi Dengan Buruh Pemetik Biji Kopi bahwa Sistem pengupahan buruh biji kopi di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dengan cara tiga hal yaitu: buruh diberikan upah buruh harian yaitu duahari memetik untuk pemilik kebun dan satu hari untuk buru, ada yang menggunakan karung sebagai takaran dua karung untuk pemilik kebun dan satu untuk karung untuk buruh pemetik dan ada yang menggunakan uang sebagai upah buruh. Adapun syarat buruh di berikan upah adalah buruh harus menyelesaikan pekerjaan yang di perintahkan oleh pemilik kebun kopi dan buruh diberikan upah sesuai perjanjian dan besaran upah yang di berikan pemilik kebun kopi kepada buruh pemetik biji kopi yaitu menggunakan uang dan takaran berupa karung, takaran berupa karung bukan di lihat dari beratnya melainkan di lihat dari besaran karungnya sedangkan mengenai waktu pengupahan yaitu buruh diberikan upah ketika selesai memetik biji kopi tersebut. Bentuk perjanjian dalam hal ini adalah menggunakan lisan tidak menggunakan tulisan. Pemilik kebun kopi menanam dua

jenis biji kopi yaitu kopi lokal dan kopi sambung maka dengan demikian ada dari sebagai pemilik kebun kopi yang tidak puas dengan keuntungan yang sedikit sehingga mereka cacat dalam perjanjian mereka memberikan upah buruh tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dengan demikian sebagai cara pemberian upah buruh di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena cara yang di lakukan tidak sesuai dengan apa yang jadi perjanjian oleh pemilik kebun kopi pada awal terjadinya perikatan. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian upah buruh dalam perjanjian kerja panen biji kopi antara pemilik kebun kopi dengan buruh pemetik biji kopi di Desa Tegal maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara memberikan upah buruhnya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sebagai dari pemilik kebun kopi cacat perjanjian yaitu upah buruh tidak sesuai dengan perjanjian awal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Semarang: Kumudasmoro, 1994.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan

Bintang, 1980. Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya

Media Pratama, 2007. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,

Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Intan Cahyani, Andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press,
2013.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sohari Rufah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo

Persada, 1979. Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung:

Pustaka Setia, 2001. **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Kredit.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999.

Buku

Agil Husin Al-Munawar, Said, *Hukum Islam dalam Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadania, 2004.

A.Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.

Abdul Karim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2006.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja

Grafindo, 2016. Ahmad, Al-Amien, *Jual Beli Kredit*,

Jakarta: Gema Insani, 1998.

Ahmad Az-Zarqa, Mushtafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al- 'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt Bakti, 2017.

Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Robani Press, 1977.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamlalah*, Jakarta: Rajawali

Pers, 2010. Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo:

Ramadhani, 1991.

Arina, *Pengaruh Handphone Dalam Kehidupan Sehari-Hari*,

Jakarta: Erlangga. Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:

Rineke Cipta, 2006.

Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*

Yogyakarta: BPFE, 2009.

Arta Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2014. Astiko, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: Andi

Offset, 1996.

Atmojo, Noto, *Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Bandung, 2010.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2009

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang*

Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul

Musthafa, 2009.

Djamil, Fahturahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di*

Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2103.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2000.

Fuad dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandiri, 1996.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mudjab Mahalli, Ahmad, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2017.
- Nuha, Ulin, *Buku Saku Fikh Mazhab Syafe'i*, Yogyakarta: Al-Barokah, 2014.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Prenada Damedia Group, 2004.

Salim, Yeni Salim , Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*,
,Jakarta

Modern English Pers, 1991.

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,

Bandung:

ALFABETA, 2018.

Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1990.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prena
Damedia

Group, 2004.

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja
Grafindo

Persada, 1994.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Grafik, 2008.

Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*,

Surabaya: Bina

Ilmu Surabaya, 2003.

Jurnal

Muzaki Harir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah,
Jurnal

Al-Adalah, Vol: XIV, No. 2, 2017.

Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, *Jurnal
Hukum*

Perdata, Vol. 29, No. 1, Februari 2017.

Wawancara

Sunayah, (*Kepala Desa*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras,
Tanggal

30 April 2020.

Ependi, (*Pemilik Pekebunan*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras, Tanggal 4 Mei 2020.

Nanang, (*Pemilik Perkebunan*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras,

Tanggal 10 Mei 2020.

Iyan, (*Petani Perkebunan*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras, Tanggal 12 Mei 2020.

Uyun, (*Pemilik Perkebunan*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras, Tanggal 17 Mei 2020.

Ade, (*Pemilik Perkebunan*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras, Tanggal 19 Mei 2020.

Wawan, (*Penerima Upah*), Wawancara dengan Penulis, Desa Ciptawaras , Tanggal 12 Mei 2020..